

LAMPIRAN

Lampiran 1. Mapping Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal, dan Penerbitan	Rumusan Masalah	Teori Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Hipotesis	Kesamaan dan Perbedaan antara Peneliti ini dengan Skripsi
1	Ramadania & Ardini (2022) Analisis Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun 2016-2020	Bagaimana kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun 2016-2020?	Memahamai impementasi kinerja pelaksanaan APBD	Deskriptif kualitatif	Terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, karena rendahnya pencapaian kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer	Implementasi kinerja pelaksanaan APBD	Kesamaan : Relevan untuk pembahasan kinerja APBD Perbedaan : Tahun dan kota peneliti dengan skripsi
2	Sutisna, Dwiputrianti, & Rahman (2022) Model Implementasi Penyusunan Anggaran Belanja Pada	Bagaimana proses penyusunan anggaran belanja yang terdapat pada sub sistem Informasi	Fokus pada penyusunan anggaran belanja daerah.	Pendekatan kualitatif	Implementasi penyusunan anggaran belanja pada SIPD di Kota Bandung kinerja implementasinya belum optimal,	Penyusunan Anggaran belanja daerah.	Persamaan : Relevan untuk analisis implementasi penyusunan anggaran belanja Perbedaan : Pemerintahan daerah di Kota Bandung

	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Di Kota Bandung	Keuangan daerah di dalam SIPD?			diindikasikan belum meratanya SDM yang kompeten dalam menyusun anggaran		
3	Petra & Sari (2021) Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat	Bagaimana efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat khususnya pada Kota Padang?	Memahami efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD pada provinsi Sumatera Barat	Penelitian deskriptif	Pada tahun 2018 kinerja dari Pemerintahan Kota Padang kurang efisien karena berada pada angka lebih dari 100% sedangkan untuk tahun 2019 cukup efisien karena tingkat efisiensinya berada pada angka 100%	Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan APBD	Persamaan : Analisis efektivitas dan efisiensi APBD Perbedaan : Tahun penerbitan dan provinsi
4	Maulidyana & Simangunson (2021) Implementasi Penyusunan APBD Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan Menurut	Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan	Penerapan penyusunan APBD menurut Peraturan Pemerintah	Deskriptif kualitatif	Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana	Penyusunan APBD menurut Peraturan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah	Persamaan : Menganalisis implementasi penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Perbedaan : Tahun saat melakukan penelitian

	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD?			dengan baik, namun dalam implementasi kebijakan tersebut masih terdapat kendala		
5	Hafidzh (2024) Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah?	Evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Normatif-empiris	APBD dilakukan melalui proses Menyusun RAB yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Setelah itu Pemerintah Pusat juga memberikan Keputusan melalui setuju atau tidak setuju terkait dengan APBD	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persamaan : Menganalisis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perbedaan : Dalam metode penelitian.
6	Efriza & Supena (2021) Proses Politik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	Apa saja yang mempengaruhi dan menghambat proses penyusunan	Menggambarkan proses politik dalam penyusunan Perda APBD	Kualitatif	DKI Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun menunjukkan	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan	Persamaan : Menganalisis penyusunan Peraturan Daerah APBD Perbedaan :

	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Peraturan Daerah APBD Tahun 2015 sehingga terjadinya konflik antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta?			adanya sejumlah kelemahan dalam hal substansi dan prosedur, diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat dalam proses penganggaran	Dan Belanja Daerah	Pembahasan mengutamakan proses politik
7	Silaban (2020) Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Bagaimana proses penyusunan APBD di Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 2011?	Implementasi penyusunan APBD pada Kabupaten Bengkulu Utara	Deskriptif Kualitatif	Implementasi penyusunan APBD telah melewati tahapan yang diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persamaan : Relevan menganalisis proses penyusunan APBD Perbedaan : Tahun dalam penerbitan
8	Permatasari & Narastri (2023) Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran	Bagaimana penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran agar lebih efektif dan	Penyusunan anggaran yang ditinjau dari Peraturan Daerah	Kualitatif (wawancara)	Proses penganggaran dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain operasional yang harus jelas hasilnya, efisiensi	Penyusunan anggaran ditinjau pada Peraturan Daerah	Persamaan : Menganalisis penyusunan anggaran ditinjau dari Peraturan Daerah Perbedaan : Studi Kasus dan Peraturan Daerah

	Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Surabaya)	bertanggungjawab dalam membangun keselarasan antara penyusunan anggaran dan laporan pelaksanaan?			(kecukupan harga) seperti inflasi dan kenaikan UMR, serta anggaran tahun sebelumnya		
9	Febriana & Narastri (2023) Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya)	Bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal yang nantinya berguna untuk menunjukkan produktifitas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas belanja daerah yang dilakukan oleh instansi	Fokus pada Laporan Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan anggaran belanja	Kualitatif (wawancara)	Kriteria ekonomis menunjukkan kinerja yang baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya dan Kriteria kurang ekonomis menunjukkan bahwa kinerja pada saat itu kurang baik	Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai pelaksanaan anggaran belanja	Persamaan : Menganalisis laporan realisasi anggaran untuk pelaksanaan anggaran belanja Perbedaan : Dalam skripsi membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

10	Warisman & Wulandari (2022) Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021	Apakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020? dan mengerahui apakah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah efisien?	Fokus pada penyusunan APBD pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat	Deskriptif kualitatif	Dalam penetapan anggaran aspek yang menentukan keberhasilan ialah tingkat realisasi yang tercapai, semakin tinggi tingkat realisasi yang dicapai pada penggunaan anggaran semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam pencapaian anggaran	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Persamaan : Menganalisis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perbedaan : Tahun dan Kota penelitian
----	---	--	--	-----------------------	---	--	---

Pedoman Wawancara

1. Tujuan

Tujuan dalam wawancara untuk mendapatkan informasi terkait:

- a. Proses penyusunan APBD di Kota Blitar dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023
- b. Peraturan penyusunan APBD terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran Kota Blitar
- c. Kendala Implementasi penyusunan APBD Kota Blitar

2. Kisi-kisi pedoman wawancara :

Pertanyaan Penelitian Kepada DPRD Kota Blitar

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai proses penyusunan APBD Kota Blitar tahun secara keseluruhan? Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tahun 2024?
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD? Apa saja mekanisme yang telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran?
4. Mengingat adanya beberapa tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah, seperti alokasi yang belum tepat sasaran, langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil oleh DPRD untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran?

Pertanyaan Penelitian Kepada BPKAD

1. Bagaimana proses penyusunan APBD di DPRD Kota Blitar secara umum? Karena biasanya terdapat alokasi anggaran yang tidak tepat, Apa langkah-langkah yang diambil DPRD untuk memperbaiki alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menilai proses penyusunan APBD Kota Blitar tiap tahun secara keseluruhan? Apakah ada perbedaan signifikan dalam prosesnya? Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tiap tahunnya?
3. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD? Apa saja mekanisme yang telah dilakukan untuk melibatkan Masyarakat?

Pertanyaan Kepada SKPD

1. Bagaimana proses perencanaan APBD di Kota Blitar secara umum?
2. Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tahun 2024?
3. Apakah prioritas anggaran yang ditetapkan dalam Perda tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Blitar?
4. Bagaimana mekanisme evaluasi terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam APBD?

Transkrip Wawancara

DPRD Kota Blitar Bagian Anggaran

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai proses penyusunan APBD Kota Blitar secara keseluruhan? Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tiap tahunnya?

Jawaban :

Dalam tiap tahun berjalan untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan karena Kota Blitar memiliki RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) tiap 5 tahun, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih spesifik di tingkat daerah. Sehingga pada setiap tahun harus memiliki beberapa capaian untuk meningkatkan kinerja aparatur daerah. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 dapat dibilang efektif karena tiap aturan-aturan memiliki pertanggungjawaban pada masing-masing pelaksanaannya.

2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD? Apa saja mekanisme yang telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat?

Jawaban :

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dilakukan pada 4 tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan masyarakat akan terlibat melalui musyawarah dan penyampaian aspirasi pada kegiatan Forum Musyawarah Pembangunan (Musrenbag) dari tingkat kelurahan hingga kota.

3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran?

Jawaban :

Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD yaitu melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan Pemerintah Daerah, bentuk pengawasan APBD diantaranya melakukan penilaian dan pemeriksaan lapangan dengan turun langsung terhadap setiap pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD.

4. Mengingat adanya beberapa tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah, seperti alokasi yang belum tepat sasaran, langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil oleh DPRD untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran?

Jawaban :

- a) DPRD dalam setiap pembahasan APBD dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Bersama TAPD, melakukan dialog, musyawarah untuk mencapai penyamaan persepsi, mencapai kesepakatan dan pemahaman.
- b) Memastikan adanya kepatuhan dan kesesuaian penyusunan Raperda tentang APBD terhadap kaidah perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BPKAD

1. Bagaimana proses penyusunan APBD di DPRD Kota Blitar secara umum? Karena biasanya terdapat alokasi anggaran yang tidak tepat, Apa langkah-langkah yang diambil DPRD untuk memperbaiki alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat?

Jawaban :

Sudah tepat dalam proses penyusunan APBD di Kota Blitar. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Blitar, seperti di daerah lainnya di Indonesia, mengikuti tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Jika terdapat alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat, berikut langkah-langkah yang biasanya dilakukan, yaitu:

- a) Melakukan evaluasi terhadap program-program yang berjalan, termasuk penilaian efektivitas, efisiensi, dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
 - b) Jika ketidaktepatan ditemukan setelah APBD berjalan, pemerintah daerah dapat mengusulkan APBD Perubahan untuk mengoreksi alokasi tersebut.
 - c) Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan anggaran. Meningkatkan transparansi melalui laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.
 - d) Memanfaatkan aplikasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran secara transparan.
2. Bagaimana Bapak/Ibu menilai proses penyusunan APBD Kota Blitar tiap tahun secara keseluruhan? Apakah ada perbedaan signifikan dalam prosesnya? Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tiap tahunnya?

Jawaban :

Dengan implementasi regulasi yang lebih kuat dan pendekatan yang berbasis bukti, proses penyusunan APBD Kota Blitar tahun 2023 memiliki potensi untuk lebih baik dibandingkan tahun 2022. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat, dalam menjalankan perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan.

3. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD? Apa saja mekanisme yang telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat?

Jawaban :

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat di Kota Blitar sudah mulai terstruktur melalui berbagai mekanisme, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SKPD

1. Bagaimana proses penyusunan APBD di Kota Blitar secara umum?

Jawaban :

Dalam proses penyusunan APBD dimulai dari tahapan perencanaan kemudian penganggaran, untuk penyusunan APBD menggunakan aplikasi SIPD untuk meminimalisir anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi.

2. Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tiap tahunnya?

Jawaban :

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2023 bisa dibilang efektif dalam mengatur penyusunan APBD karena dalam penyusunan APBD di Kota Blitar sudah sesuai dengan prosedur.

3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan APBD di Kota Blitar? Apakah ada inovasi atau kebijakan baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran?

Jawaban :

Kota Blitar dalam pelaksanaan APBD dapat dibilang bagus, Kota Blitar juga beberapa kali mendapat penghargaan seperti SAKIP dapat A, untuk kendala sendiri tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan APBD

4. Bagaimana mekanisme evaluasi terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam APBD?

Jawaban:

Untuk pelaksanaan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Blitar melakukan evaluasi kinerja berjenjang dan dilakukan secara rutin, capaian dalam evaluasi ini nanti akan di Analisa apakah program pembangunan dan dokumen perencanaan targetnya harus di naikan atau sesuai dengan RPJMD.

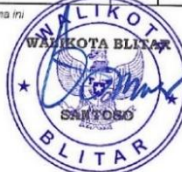
Lampiran 2. Laporan Realisasi APBD Tahun 2022



PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Reff	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	% Realisasi 2021
1	PENDAPATAN	7.5.1.1			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1			
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	41.159.873.532,00	45.120.805.451,10	109,52
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	7.785.665.339,00	6.777.531.072,50	87,05
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	1.104.857.721,00	865.196.947,24	80,13
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	125.694.460.105,00	103.484.636.522,68	82,20
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		175.844.686.797,00	156.269.172.003,52	88,82
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2			
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana	7.5.1.1.2.1			
10	Perimbangan	7.5.1.1.2.1.1	127.236.353.301,00	130.296.308.030,00	102,40
11	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.2.1.2	302.626.749.150,00	392.526.749.070,00	100,00
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.3	19.738.150.000,00	18.028.651.209,00	91,34
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.1.1.2.1.4	66.340.999.002,00	54.940.729.877,00	82,82
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		605.944.252.353,00	595.594.648.188,00	98,34
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.5.1.1.2.2			
16	Dana Insentif Daerah	7.5.1.1.2.2.1	56.255.400.000,00	56.255.400.000,00	100,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16)		56.255.400.000,00	56.255.400.000,00	100,00
18	Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.2.3			
19	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.2.3.1	87.596.814.116,00	90.599.850.587,00	103,41
20	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.3.2	11.557.053.000,00	11.507.063.000,00	99,57
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (19 s.d. 20)		99.156.877.116,00	102.096.913.687,00	102,97
22	Jumlah Pendapatan Transfer (14+17+21)		761.355.529.469,00	754.236.561.873,00	99,07
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3			
24	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.1	8.072.453.404,00	8.063.076.404,00	99,88
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24)		8.072.453.404,00	8.063.076.404,00	99,88
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+25)		846.372.639.670,00	919.588.210.260,52	97,16
27	BELANJA	7.5.1.2			
28	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1			
29	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	335.279.755.405,00	323.977.811.620,00	96,63
30	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	556.205.565.515,00	500.965.795.379,86	89,75
31	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.3	27.590.349.477,00	25.865.473.481,00	93,82
32	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.4	23.648.136.566,00	23.569.922.320,00	99,67
33	Jumlah Belanja Operasi (28 s.d. 32)		944.723.827.063,00	874.420.007.000,86	92,56
34	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2			
35	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	1.176.670.000,00	680.732.436,00	74,65
36	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	76.482.748.240,00	69.037.519.911,09	89,95
37	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	28.069.344.193,00	27.666.316.128,64	98,77
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	63.848.357.572,00	61.355.000.063,88	96,40
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	3.097.073.893,00	2.936.194.731,78	75,39
40	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00
41	Jumlah Belanja Modal (35 s.d. 40)		174.064.193.866,00	169.877.763.265,39	92,41
42	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3			
43	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.3.1	59.468.806.397,00	2.333.212.840,06	3,92
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga (43)		59.468.806.397,00	2.333.212.840,06	3,92
45	Jumlah Belanja (33+41+43)		1.178.314.827.318,00	1.037.630.583.106,27	88,06
46	SURPLUS/DEFISIT (26-45)		(252.941.987.648,00)	(119.052.772.825,75)	51,11
47	PEMBIAYAAN	7.5.1.3			
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1			
49	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	7.5.1.3.1.1	239.941.987.648,00	239.941.987.648,01	100,00
50	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.1.3.1.2	0,00	175.827.797,61	0,00
51	Jumlah Penerimaan (49 s.d. 50)		239.941.987.648,00	240.117.815.445,62	100,07
52	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.2			
53	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.1	5.000.000.000,00	0,00	0,00
54	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2.2	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
55	Jumlah Pengeluaran (53 s.d. 54)		7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	28,57
56	PEMBIAYAAN NETTO (51-55)		232.941.987.648,00	238.117.815.445,62	102,22
57	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (46+56)	7.5.1.4	0,00	119.055.042.620,07	239.941.987.648,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



Lampiran 3. Laporan Realisasi APBD Tahun 2023

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	48.418.787.698,00	56.381.185.255,00	116,44	45.120.805.461,10
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	8.115.260.641,00	7.830.222.821,23	96,49	6.777.531.072,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	1.042.119.575,00	1.042.119.574,56	100,00	885.196.947,24
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	110.782.857.987,00	106.342.156.180,37	95,99	103.484.638.522,68
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		168.359.025.901,00	171.595.683.831,16	101,92	156.268.172.003,52
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.2.1.1	95.313.616.625,00	92.510.557.565,00	97,06	130.286.308.030,00
11	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.2	414.386.984.313,00	417.003.510.313,00	100,63	392.628.749.070,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.1.1.2.1.3	11.081.818.000,00	9.770.554.891,00	88,17	18.028.961.209,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.1.1.2.1.4	68.367.653.880,45	67.415.695.578,00	98,61	54.940.729.677,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		589.150.072.818,45	586.700.318.147,00	99,58	595.884.648.186,00

No	Uraian	Reff	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah	7.5.1.1.2.2.1	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	100,00	56.255.400.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16)		53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	100,00	56.255.400.000,00
18	Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.2.3.1	89.365.629.092,00	106.195.788.000,00	118,83	90.589.850.687,00
20	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.3.2	1.524.913.621,00	1.524.913.621,00	100,00	11.507.063.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (19 +20)		90.890.542.713,00	107.720.701.621,00	118,52	102.096.913.687,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer(14+17+21)		733.587.394.531,45	747.967.798.768,00	101,96	754.236.961.873,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
24	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.1	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	99,76	8.063.076.404,00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24)		9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	99,76	8.063.076.404,00
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+24)		910.973.490.403,93	928.568.700.011,69	101,93	918.568.210.280,52
27	BELANJA	7.5.1.2				
28	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
29	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	328.600.991.307,00	314.865.852.902,00	95,82	323.977.811.820,00
30	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	467.615.800.255,00	443.446.489.987,36	94,83	500.986.799.379,88
31	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.3	42.000.565.057,00	40.770.317.144,00	97,07	25.885.473.481,00
32	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.4	20.675.919.120,00	20.627.654.900,00	99,77	23.569.922.320,00
33	Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 32)		858.893.275.739,00	819.710.314.933,36	95,44	874.420.007.000,88
34	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
35	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	880.732.430,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	28.533.367.033,00	26.322.308.618,00	92,25	68.037.519.911,09
37	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	64.037.450.196,00	62.954.436.910,00	98,31	27.666.316.128,64
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	46.302.333.759,00	45.263.635.846,00	97,76	61.355.000.063,88
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	2.168.926.297,00	2.097.644.616,00	96,71	2.938.194.731,78
40	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	-
41	Jumlah Belanja Modal (35 s.d. 40)		141.042.077.285,00	136.638.025.990,00	96,88	160.877.763.265,39
42	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
43	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.3.1	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	15,99	2.333.212.840,00
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga (43)		15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	15,99	2.333.212.840,00
45	Jumlah Belanja (33+41+44)		1.015.028.533.024,00	958.762.098.374,36	94,46	1.037.630.983.106,27
46	SURPLUS/DEFISIT (26-45)		(104.055.042.620,07)	(30.193.398.362,67)	29,02	(119.062.772.825,75)
47	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1				
49	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	7.5.1.3.1.1	119.055.042.620,07	119.053.885.988,07	100,00	239.941.987.648,01
50	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.3.1.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.1.3.1.3	0,00	133.830.522,46	0,00	175.827.797,81
52	Jumlah Penerimaan (49 s.d. 51)		129.055.042.620,07	129.187.716.510,53	100,10	240.117.815.445,82

No	Uraian	Reff	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
53	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.2				
54	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.1	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	0,00
55	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
56	Jumlah Pengeluaran (54 + 55)		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
57	PEMBIAYAAN NETTO (52-56)		104.055.042.620,07	104.187.716.510,53	100,13	238.117.815.445,82
58	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (46+57)	7.5.1.4	0,00	73.994.318.147,86		119.055.042.620,07

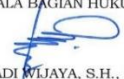
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

Lampiran 4. Dokumen Observasi Pada Anggota DPRD



Lampiran 5. Dokumen Observasi Pada SKPD



Lampiran 6. Dokumen Observasi Pada BPKAD



Lampiran 7. Surat Izin Penelitian

YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

 PROGRAM STUDI EKONOMI BISNIS (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (SI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (SI)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI (S3)
Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5925289, 082233788126 E-mail: fe@untag-sby.ac.id

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Nomor : 3022/K/FEB/X/2024
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Ijin Untuk
Mengadakan Riset Pendahuluan**

Kepada : Yth. Pemerintah Kota Blitar
Jl. Merdeka No.105, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Dengan hormat,
Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1,
maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan skripsi sebagai
hasil penerapan pelajaran teori serta praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak /
Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : THERESIA ULISANTURI
N.P.M : 1222100077
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Alamat : Jl. Bali No. 117, Kelurahan Karangtengah Kec.
Sananwetan Kota Blitar
Telp./HP. 087756766443

Guna melakukan penelitian pendahuluan pada :
"PEMERINTAH KOTA BLITAR"
untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi yang sedang disusunnya.

Demikian permohonan ini atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Prof. Dr. H. Slamet Riyadi, MSi., Ak. CA., CTA
NPP. 20220.93.0319

Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Anjasmoro Nomor 21, Blitar, Kode Pos: 66117, Telp. (0342) 804063
<http://bakesbangpol.blitarkota.go.id>, email: bakesbangpol@blitarkota.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/349/410.204.1/2024

UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH

Memperhatikan : Surat dari Dekan Dekan FEB Universitas 17 Agustus Surabaya Nomor 3022/K/FEB/X/2024 Perihal Pemohonan Ijin untuk Mengadakan Riset Pendahuluan.

Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **THERESIA ULI SIANTURI**
 NIM : 1222100077
 Universitas : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Fakultas/Prodi : Akuntansi
 Alamat : JL. BALI NO 117
 Tempat Penelitian : BPKAD, SEKRETARIAT DPRD
 Judul : **Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

Waktu Pelaksanaan : 05 Desember 2024 s/d 09 Desember 2024

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research / Magang.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Mematuhi Standar Protokol Kesehatan (Prokes).
6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 05 Desember 2024
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
 DAN POLITIK KOTA BLITAR



TOTO ROBANDIYO S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP.196612041996031004

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala BPKAD Kota Blitar;
3. Sekretaris DPRD ;
4. Dekan Fakultas Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Yang Bersangkutan.

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), BSSN"

Lampiran 9. Kartu Bimbingan

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Pst 140&141 E-mail: feb@untag-sby.ac.id

SEMESTER
 Gasal / Genap
 2024 / 2025

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa / NBI : Theresia Uli Sianturi /
 Nama Pembimbing : Maulidah Narasari, SE., MA
 Judul Skripsi : Implementasi Penyusunan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Pitingau Dari Peraturan Daerah Kota Blitar
 Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2024
 Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak. Selesai Bimbingan Tanggal

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	18-09-2024	Prop Bab 1	Revisi judul : Cari Peraturan yg berlaku	m. [Signature]
2	19-09-2024	Prop Bab 1	Acc topik dan judul. Lanjutkan bab 1	[Signature]
3	25-09-2024	Prop Bab 2	Bab 1 acc. Lanjutkan bab 2	[Signature]
4	2-10-2024	Prop Bab 2	Acc bab 2. Lanjutkan bab 3	[Signature]
5	11-10-2024	Prop Bab 3	Acc bab 2. Koreksi teknik penelitian	[Signature]
6	14-10-2024	Acc	Siapkan berkas sidang	[Signature]
7	29-11-2024	Bab 1-4	Revisi hasil Sempoa, dan Substansi	[Signature]
8	5-12-2024	Bab 4	Revisi sub bab 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	[Signature]
9	9-12-2024	Bab 1-5	ACC. Siapkan berkas sidang	[Signature]

Perpanjangan I
 Semester : _____
 Th. Ak. : _____
 Paraf Kujur : _____

Surabaya, 9 Desember 2024.
 m. [Signature]
 Maulidah Narasari, SE., MA
 (Nama dan tanda tangan Pembimbing)

Lampiran 10. Hasil Turnitin

template artikel.docx			
ORIGINALITY REPORT			
20%	19%	10%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	ppid.blitarkota.go.id Internet Source	1	1%
2	core.ac.uk Internet Source	1	1%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1	1%
4	journal.yrpioku.com Internet Source	1	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1	1%
6	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	1	1%
7	www.taputkab.go.id Internet Source	1	1%
8	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1	1%
9	je.ejournal.unri.ac.id Internet Source	1	1%

10	media.neliti.com Internet Source	1 %
11	banjarnegarakab.go.id Internet Source	1 %
12	library.unmer.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	Ansar Ansar, Zulkifli Aspan, Abdul Razak. "Principle of Maximum Liability of Available Resources (MAR) in Regional Finance in Indonesia", Jambura Law Review, 2022 Publication	<1 %
16	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %
17	jdih.brebeskab.go.id Internet Source	<1 %
18	trenggalek.jatimtimes.com Internet Source	<1 %
19	accesson.kr Internet Source	<1 %

berita96gerr.blogspot.com

20	Internet Source	<1 %
21	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.localstartupfest.id Internet Source	<1 %
23	www.scilit.net Internet Source	<1 %
24	conference.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
25	data.surakarta.go.id Internet Source	<1 %
26	www.dprd-diy.go.id Internet Source	<1 %
27	Amrie Firmansyah, Muhamad Rizal Yuniar, Zef Arfiansyah. "KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA: TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH", Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 2022 Publication	<1 %
28	batamclick.com Internet Source	<1 %
29	id.scribd.com Internet Source	<1 %

30	investor.waskita.co.id Internet Source	<1 %
31	tito-onedesign.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
33	docplayer.info Internet Source	<1 %
34	ejournal.insud.ac.id Internet Source	<1 %
35	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
36	es.scribd.com Internet Source	<1 %
37	fakhrudinhidayat.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
39	id.123dok.com Internet Source	<1 %
40	medanbisnisdaily.com Internet Source	<1 %
41	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

42	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.bandungsiana.com Internet Source	<1 %
44	www.bisnisdanteknologi.com Internet Source	<1 %
45	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
46	www.scribd.com Internet Source	<1 %
47	Lenny Kawandy, Oktavianus Pasoloran, Suwandi Ng. "PSYCHOLOGICAL CAPITAL DAN KECUKUPAN ANGGARAN SEBAGAI MEKANISME PENINGKATAN PROSES PARTISIPASI ANGGARAN UNTUK MENCAPAI KINERJA MANAJERIAL", AJAR, 2019 Publication	<1 %
48	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
Exclude quotes Off Exclude matches Off Exclude bibliography On		